

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat dari pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi masyarakat. (Bps Sumsel 2015)

United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif sebagai proses dari perluasan pilihan tersebut. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembangunan seringkali dilihat dari mutu sumber daya manusianya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayahnya dengan aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi sehingga peran masyarakat dengan sendirinya akan meningkat. Paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama (UNDP, 1995), yaitu:

a. Produktivitas

Mankiw (2006) menjelaskan bahwa standar hidup di berbagai negara dikaitkan dengan produktivitas. Produktivitas yang tinggi dari suatu negara dapat membuat masyarakatnya menikmati standar hidup yang tinggi karena tingkat produktivitas menentukan tingkat pertumbuhan rata-rata masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu dari jenis pembangunan manusia.

b. Ekuitas

Masyarakat harus memiliki akses dalam memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat ikut serta dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini.

c. Kestinambungan

Kesempatan yang ada harus berkesinambungan hingga generasi di masa mendatang sehingga generasi di masa datang dapat memperoleh akses kesempatan yang sama sehingga semua sumberdaya fisik dan lingkungan harus diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat harus berpartisipasi secara penuh untuk menentukan langkah kehidupan mereka. Keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. IPM diperkenalkan oleh UNDP

pertama kali pada tahun 1990 dan secara berkala dipublikasikan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Terdapat tiga dimensi dasar yang membentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat merupakan dimensi dari indeks kesehatan yang menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. BPS mendefinisikannya sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang sejak lahir.

Dimensi pengetahuan merupakan dimensi dari indeks pendidikan yang menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai pendidikan formal yang digunakan penduduk dalam jumlah tahun. Cakupan penduduk yang dihitung adalah usia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Dimensi pendidikan ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia.

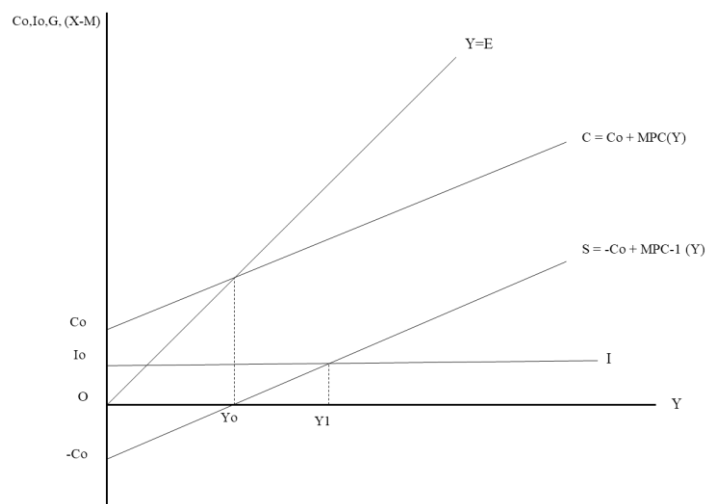
Dimensi standar hidup layak merupakan dimensi dari indeks pengeluaran yang menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Semakin tinggi paritas daya beli masyarakat

di suatu wilayah, maka semakin tinggi standar hidup layak di wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam membangun mutu hidup masyarakat di suatu wilayah yang digunakan untuk menentukan level pembangunan di wilayah tersebut. Selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

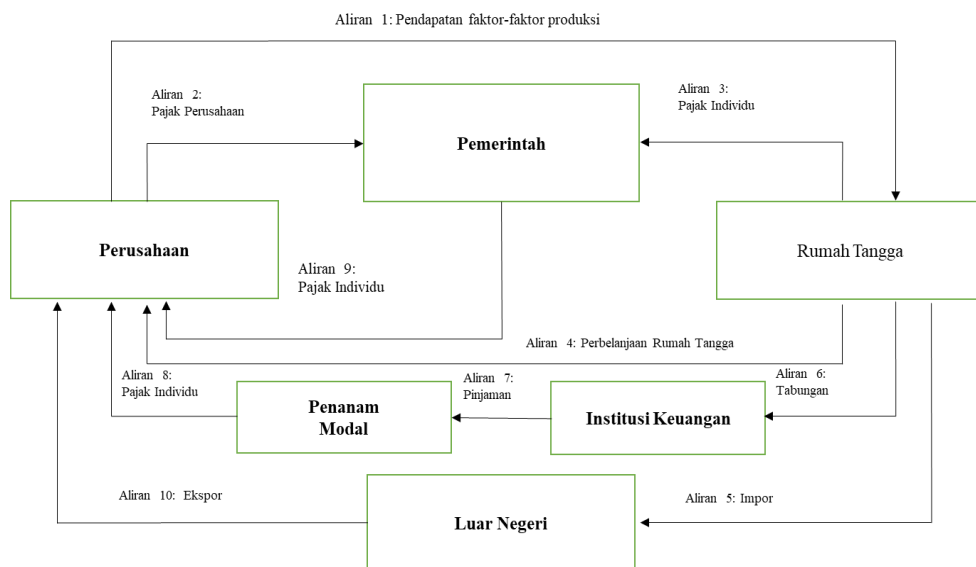
Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Statistik ini selalu dihitung setiap 3 bulan dari segudang sumber data primer. Tujuan GDP adalah menringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2006). Berikut adalah gambar Kurva Pendapatan Nasional



Gambar 2.1
Kurva Pendapatan Nasional (Pendekatan Pengeluaran)

Sumber: Sukirno 2012

Berdasarkan kurva pada Gambar 2.1 terlihat bagaimana tingkat pengeluaran Rumah Tangga, Perusahaan, dan Pemerintah yang terdiri dari Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Net Ekspor-Import. Adapun sirkulasi setiap transaksinya dapat dilihat pada siklus Perekonomian Terbuka seperti berikut:



Gambar 2.2
Siklus Perekonomian Terbuka

Sumber: Sukirno, 2012

Ekonomi suatu bangsa (GDP,GNP) atau suatu daerah PDRB tentu harus tumbuh. Maka pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan GDP dan GNP atau PDRB untuk daerah. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Secara normal pertumbuhan ekonomi berkisar 3-8 persen (Hudiyanto, 2014). Nilai GDP

dan GDP dapat menunjukkan pertumbuhan perekonomian dari setiap tahunnya dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan GDP tahun } t = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}}$$

Pada pertumbuhan ekonomi, memiliki beberapa teori yang di jelaskan beberapa ahli ekonomi. Maka dari itu, didalam penelitian ini mengambil beberapa teori untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Teori tersebut antara lain ;

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama proses pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berimbas pada meningkatnya produktivitas masyarakat di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro dan Smith, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan masyarakat di suatu wilayah mengalami peningkatan. (Situngkir, 2009) kemudian menyatakan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi yang tepat adalah melalui pendapatan per kapita yang menuntut adanya kenaikan pendapatan nasional.

b. Teori Pertumbuhan Klasik

Ahli ekonomi klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Para ahli ekonomi menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penambahan penduduk yang tinggi akan mengurangi keuntungan. Hal ini dikarenakan setiap tambahan penduduk akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas menjadi negatif yang mengakibatkan kemakmuran masyarakat menurun kembali dan tingkat perkembangan ekonomi sangat rendah. Keadaan seperti ini disebut dengan keadaan tidak berkembang dan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup.

c. Teori Schumpeter

Schumpeter menjelaskan pentingnya peran pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian apapun, pengusaha akan menciptakan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara (Hudiyanto, 2014).

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik muncul pada pertengahan tahun 1950an. Teori ini merupakan analisis yang didasarkan pada

pandangan ahli ekonomi klasik yaitu Solow dan kemudian dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Solow dan Denison menyimpulkan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah modal dan tenaga kerja, melainkan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

e. Teori Pertumbuhan Baru: Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen pertama kali dikemukakan oleh Paul M Romer yang mengkaji imbasan teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Perilaku aliran modal dari negara-negara berkembang memicu konsep pertumbuhan endogen atau yang dikenal teori pertumbuhan baru.

Teori pertumbuhan baru menjelaskan proses produksi dan kekuatan yang bukan dari luar sistem dengan melihat pertumbuhan pendapatan nasional yang persisten. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya tabungan dan investasi modal manusia guna mempercepat pertumbuhan. Potensi pengembalian yang tinggi oleh negara berkembang berkurang dengan cepat dikarenakan rendahnya investasi komplementer dalam sumber daya manusia (pendidikan), infrastruktur, atau riset dan pengembangan. (Todaro dan Smith, 2003). Teori pertumbuhan baru menjelaskan hasil endogen dari investasi negara dalam sumber daya manusia dan industri padat pengetahuan berupa teknologi. Teori ini mendorong peran aktif dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui

penggunaan teknologi berupa industri perangkat lunak dan telekomunikasi.

3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam Indeks Pembangunan Manusia, terdapat tiga indeks yang menjadi komponen perhitungan.

a. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dihitung dengan melihat angka harapan hidup saat lahir dalam satuan tahun dengan rumus:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

I = Indeks

AHH = Angka Harapan Hidup

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dihitung dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dengan rumus:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

c. Dimensi Pengeluaran

Dimensi pengeluaran dihitung dengan menggunakan pengeluaran perkapita disesuaikan.

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{\min})}{\ln(pengeluaran_{\max}) - \ln(pengeluaran_{\min})}$$

d. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dihitung sebagai rata-rata geometric dari ketiga indeks komponennya dan dinyatakan dalam bentuk poin.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto untuk tingkat Regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks ini PDB maupun PDRB dapat dilihat dari dua sisi pendekatan yaitu sektoral dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber pendapatan dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu di ciptakan

oleh sektor-sektor ekonomi atas sebagai aktivitas produksinya sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah tersebut.

Metode perhitungan pendapatan nasional meliputi tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Dengan pendekatan produksi pendapatan nasional di hitung dengan menjumlahkan produksi barang-barang dan jasa selama periode tertentu (Yuliadi,2007)

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunnya disajikan dalam 2 (dua) penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan harga tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya di dasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

5. Infrastruktur

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas yang dapat memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi masyarakat dalam menunjang distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada daerah yang sulit dijangkau. Infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan transportasi dan energi. Infrastruktur transportasi berkaitan dengan jangkauan dan lokasi dalam proses penyampaian barang dan jasa. Infrastruktur energi berkaitan dengan konsumsi listrik dan konsumsi air bersih dalam masyarakat.

6. Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terbagi atas tiga jalur diantaranya yang pertama jalur pendidikan formal, kedua jalur pendidikan nonformal dan yang terakhir yaitu jalur pendidikan informal. Dimana ketiga jalur pendidikan tersebut dapat saling melengkapi, sebagai mana di atur dalam undang-undang no 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam bidang pendidikan variabel-variabel seperti jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid seringkali di munculkan sebagai gambaran situasi suatu pendidikan.

Belanja pemerintah merupakan pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Sukirno (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan sebuah kebijakan fiskal., yakni tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian di suatu daerah setiap tahun yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk skala regional dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk skala nasional. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Mangkoesobroto (1999), kebijakan pemerintah dicerminkan melalui belanja pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan pembelian barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Model pembangunan tentang perkembangan belanja pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan belanja pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang diklasifikasikan menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan, pemerintah tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap ini, akan banyak terdapat masalah akibat investasi pihak swasta. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi dampak negatif dan melindungi buruh lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, Rostow menyatakan aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Menurut Dumairy (1999) ada empat peran yang dimiliki pemerintah, yaitu:

a. Alokatif

Peran alokatif merupakan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang sudah ada agar lebih optimal pemanfaatannya sehingga mendukung produksi yang efisien.

b. Distributif

Peran distributif ialah peran pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil.

c. Stabilitatif

Peran stabilitatif merupakan peran pemerintah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan memulihkan jika dalam keadaan tidak seimbang.

d. Dinamisatif

Peran dinamisatif merupakan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar mengalami kemajuan.

7. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Produk domestik Regional Bruto dengan indeks Pembangunan manusia

Menurut Midgale (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalannya baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali dengan diikuti peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai sesuatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan

produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengeloloan sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). Ramirez dkk (1998) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik (*two way relationship*) antara human capital dan pertumbuhan ekonomi. Studi Ramirez berangkat dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (*human development*).

Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalance*). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (*strong link*) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (*weaklink*) antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang” (*unbalance link*) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya.

b. Hubungan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia

World Bank (1994) menyatakan konsensus perusahaan bahwa peningkatan akses infrastruktur seperti energi, air, dan transportasi

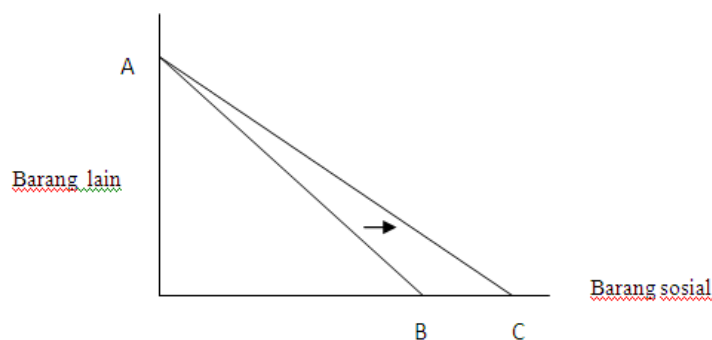
secara langsung menguntungkan individu dan rumah tangga, komunitas, dan perusahaan. Hal tersebut juga menguntungkan individu dan rumah tangga dengan mengurangi biaya dan menaikkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang akan membantu mengembangkan pendidikan dan kesehatan individu, yang akhirnya meningkatkan pembangunan manusia di tingkat lokal maupun nasional.

Jacoby (2002) menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur secara langsung menguntungkan perusahaan bisnis melalui perluasan peluang pasar. Dengan semakin baiknya infrastruktur, maka akses dan proses pendistribusian barang maupun jasa di bidang pendidikan dan kesehatan akan semakin mudah sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

c. Hubungan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Mekanisme pokok dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal (Todaro, 1994). *United Nations* menyatakan bahwa pendidikan adalah hal mendasar dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Bangsa-bangsa miskin telah menginvestasikan dana yang besar untuk investasi di bidang pendidikan karena tenaga ahli yang dapat membaca dan menulis dianggap lebih dapat memahami produk dan material yang terus berkembang.

Manusia yang memiliki modal pendidikan yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik dalam mengemban tugas besar pada pembangunan sehingga belanja pemerintah di bidang pendidikan akan memperluas pilihan masyarakat dalam perluasan kesempatan bersekolah. Dalam hal ini dengan adanya perluasan kesempatan bersekolah, masyarakat akan memiliki perluasan pilihan dalam penyediaan kesempatan kerja, serta terciptanya kelompok pimpinan terdidik, pengetahuan yang lebih baik, dan pelatihan dalam rangka menghilangkan buta huruf. Perluasan pilihan masyarakat dengan adanya pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam gambar berikut:



Sumber: Sukirno, 2008

Gambar 2.3

Perubahan garis anggaran akibat adanya pengeluaran

Gambar di atas menjelaskan kenaikan belanja pemerintah untuk sosial, contohnya subsidi sekolah, yang mengakibatkan garis anggaran AB bergeser menjadi AC. Dalam hal ini, belanja pemerintah di bidang pendidikan

memperluas peluang pilihan pada masyarakat yang akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Jefri Alif Utama, Teguh Hadi Priyono, Lilis Yulianti (2015) dengan judul Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Karesidenan Besuki), dengan menggunakan analisis data panel dan analisis lintas. Hasil analisis menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia di wilayah Eks karesidenan Besuki tidak ada yang berada pada *level lower* dan terus mengalami peningkatan pada periode 2004-2013. Pengaruh pendapatan sektoral dan belanja modal secara regresi berpengaruh secara signifikan sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara struktural pendapatan sektoral memiliki pengaruh yang sangat besar karena memiliki pengaruh total yang lebih besar terhadap indeks pembangunan manusia dibandingkan belanja modal dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Irawan (2009) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 1990-2007 dengan menggunakan analisis regresi linier logaritme. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada tiga dari empat variabel memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap IPM.

3. Nurhikmah Amalia Hasan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah istimewa yogyakarta pada priode 2008-2014” dengan menggunakan metode data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. Basnawi Amin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mepengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun priode 2010-2015” dengan menggunakan metode Analisis Data Panel dengan Pendekatan *Random Effect Models*, hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel independen Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karisidenan Madiun tahun 2010-2015, sedangkan variabel Rasio Gini dan Upah Minimum Kabupaten/Kota kedua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karisidenan Madiun tahun 2010-2015.

5. Taryono dan Hendro Ekwarso (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ketersediaan Infrastruktur di Pulau Sumatera” dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya panjang jalan di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 3,81%. Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sehingga ketersediaan infrastruktur jalan di Pulau Sumatera pada tahun 2010 sepanjang 161.326 Km. Jumlah pelanggan listrik di Pulau Sumatera selama periode 2009-2011 tumbuh sebesar 19,29% dengan konsumsi listrik meningkat sebesar 333,50 KWH/kapita. Dan pada umumnya di wilayah Sumatera (62%) desa menggunakan Pompa Listrik/Tangan/Sumur sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik masyarakat.

6. Kusharjanto dan Kim (2011) menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur secara signifikan akan meningkatkan pembangunan manusia. Infrastruktur listrik memiliki pengaruh yang lebih baik daripada infrastruktur lainnya seperti air, jalan, dan jumlah kelas per siswa. Untuk setiap kenaikan 1% proporsi dari listrik rumah tangga akan menaikkan IPM sebanyak 0,2%.

7. Nurfitriani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Bengkulu periode 2010-2014”. Berdasarkan penelitian tersebut menyatakan bahwa Variabel Pemberdayaan Gender dan Infrastruktur Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Variabel Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan,

sedangkan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu.

8. Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyingsih dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008-2014” Studi Kasus Kab/Kota di Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagian besar variable bebas mempengaruhi indek pembangunan manusia kecuali pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan indeks Pembangunan Manusia, hal ini dikarenakan kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

9. Connolly, at al. (2014). Meneliti tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi Indeks Pemabngunan Manusia yang tinggi dengan menggunakan regresi linier klasik dengan menggunakan variabel independen angka harapan hidup, tingkat melek huruf, PDB per kapita, pendidikan, dan inflasi terhadap perkembangan manusia di seluruh dunia. Beberapa teori menunjukkan bahwa tingkat melek huruf merupakan indikator penting terhadap perkembangan manusia namun hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Hasil ini memastikan bahwa pendidikan memiliki efek marjinal tertinggi di antara faktor penentu.

10. Menurut Graham (2010) hal yang paling utama untuk menentukan *HDI (Human Development Index)* adalah sejauh mana orang dengan harapan

rendah, informasi yang terbatas, dan norma kualitas layanan yang buruk melaporkan kepuasan lebih pada mereka layanan, pekerjaan, dan kesehatan, antara lain, dibanding responden dengan standar yang lebih tinggi dan aspirasi serta pelayanan yang lebih baik.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1.	Septian Jefri Alif Utama, Teguh Hadi Priyono, Lilis Yulianti (2015) “Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Karesidenan Besuki)”	Variabel Dependen : 1. IPM Variabel Independen : 1. PDRB 2. Belanja Modal 3. Kemiskinan	Analisis Data Panel	Indeks Pembangunan Manusia di wilayah eks keresidenan Besuki tidak ada yang berbeda secara signifikan pada <i>level lower</i> tetapi terus mengalami peningkatan pada priode 2014-2013.
2.	Muhammad Ilham Irawan (2009) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 1990-2007”	Variabel Dependen : 1. IPM Variabel Independen : 1. Produk Domestik Bruto (PDB) 2. Pengeluaran Pemerintah 3. PMA 4. PMDN	Regresi Linier Logaritma	Hasil analisis menunjukkan ada tiga dari empat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Yang pertama Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan dan yang kedua Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
3.	Nurhikmah Amalia Hasan (2016) “Pengaruh Produk Domestik Regional	Variabel Dependen : 1. IPM	Regresi Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

	Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah istimewa yogyakarta pada priode 2008-2014”	Variabel Independen : 1. PDRB 2. Kemiskinan 3. Belanja Modal		di daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4.	Basnawi Amin (2017) Analisis “faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2010-2015”	Variabel Dependen : 1. IPM Variabel Independen : 1. Jumlah Penduduk Miskin 2. Rasio Gini 3. Upah Minimum Kabupaten	Regresi Data Panel Dengan pendekatan model Rendom efek (<i>random effect model</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel independen jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karisidenan Madiun periode tahun 2010-2015. Sedangkan variabel rasio gini dan upah minimum kabupaten/kota keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Eks Karisidenan Madiun periode tahun 2010-2015.
5.	Taryono dan Hendro ekwarso (2013). Analisis Ketersediaan Infrastruktur di Pulau Sumatera	Variabel Dependen: 1. Infrastruktur Variabel Independen : 1. Infrastruktur Jalan 2. Infrastruktur Listrik 3. Infrastruktur Telekomunikasi 4. Air Bersih	Analisis Deskriptif	Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya panjang jalan di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 3,81%. Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sehingga ketersediaan infrastruktur jalan di Pulau Sumatera pada tahun 2010 sepanjang 161.326 Km. Jumlah pelanggan listrik di Pulau Sumatera selama periode 2009-2011 tumbuh sebesar 19,29% dengan konsumsi listrik meningkat sebesar 333,50 KWH/kapita. Dan pada umumnya di wilayah Sumatera (62%) desa menggunakan Pompa Listrik/Tangan/Sumur sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik masyarakat.

6.	Kusharjanto dan Kim (2011) “Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia di pulau Jawa Indonesia priode 2002-2005”	<p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPM <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Listrik 2. Infrastruktur Jalan 3. Infrastruktur Air Bersih 4. Infrastruktur Jumlah Ruang Kelas 	Regresi Data Panel	<p>Penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur secara signifikan akan meningkatkan pembangunan manusia. Infrastruktur listrik memiliki pengaruh yang lebih baik daripada infrastruktur lainnya seperti air, jalan, dan jumlah kelas per siswa. Untuk setiap kenaikan 1% proporsi dari listrik rumah tangga akan menaikkan IPM sebanyak 0,2%.</p>
7.	Nurfitriani (2017) “faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu priode 2010-201”	<p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPM <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Belanja Pemerintah Sekor Pendidikan 2. Anggaran Belanja Pemerintah Sekor Kesehatan 3. Indeks Pemberdayaan Gender 4. Infastruktur Jalan. 	Regresi Data Panel	<p>Berdasarkan analisis bahwa Variabel Pemberdayaan Gender dan Infrastruktur Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Vriabel Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu.</p>

8.	Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyingsih “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008-2014” Studi Kasus Kab/Kota di Yogyakarta	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Perkapita 2. Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan 3. Pengeluaran Pemerintah untuk Fasilitas Umum 4. Rasio Gini 5. Jumlah Penduduk Miskin 	Regresi Data Panel	hasil penelitian dapat disimpulkan sebagian besar variable bebas mempengaruhi indek pembangunan manusia kecuali pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan indeks Pembangunan Manusia, hal ini karena kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
9.	Connolly, at al. (2014). Meneliti tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi Indeks Pemabngunan Manusia	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Hidup 2. Tingkat Melek Huruf 3. PDB Per Kapita 4. Pendidikan 5. Inflasi 	Regresi Linier	Dalam penelitian Beberapa teori menunjukkan bahwa tingkat melek huruf merupakan indikator penting terhadap perkembangan manusia namun hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Hasil ini memastikan bahwa pendidikan memiliki efek marjinal tertinggi di antara faktor penentu.
10.	Graham (2010). <i>The Challenges of Incorporating Empowerment into the HDI</i>		kualitatif	hal yang paling utama untuk menentukan <i>HDI</i> adalah sejauh mana orang dengan harapan rendah, informasi yang terbatas, dan norma kualitas layanan yang buruk melaporkan kepuasan lebih pada mereka layanan, pekerjaan, dan kesehatan,

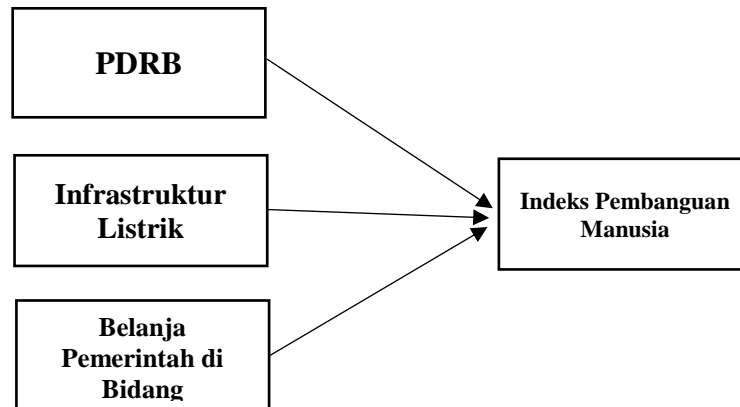
C. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kab/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015
2. Diduga variabel Infrastruktur Listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kab/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.
3. Diduga variabel Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kab/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015
4. Secara keseluruhan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Infrastruktur Listrik, dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kab/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.

D. Model Penelitian

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan model penelitian yang menjadi dasar sekaligus kerangka berpikir dalam melihat pengaruh variabel penentu Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya, informasi mengenai model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4

Skema Model Penelitian

Dari gambar 2.2, penulis ingin mengkaji apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Infrastruktur Listrik, dan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk pengujian ini akan di gunakan analisis data panel.